

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Era persaingan global pada saat ini, batas-batas negara bukan menjadi penghalang untuk berkompetisi. Tahun 2015 negara-negara ASEAN akan memasuki dunia baru yakni AEC (*Asean Economic Community*). Sehingga perusahaan di negara ASEAN dituntut untuk selalu tetap menunjukkan performa yang baik untuk dapat tetap bersaing. Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* (GCG) yang akan mampu memenangkan persaingan. Menurut Zahro (2012) menjelaskan, GCG merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh. GCG diperlukan untuk menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat sehingga mampu menjadi perusahaan dunia.

Dari sudut pandang kontemporer menurut Tricker (1984) dalam Natalia (2012:17), *corporate governance* digambarkan sebagai suatu jaringan hubungan antara sekelompok pemangku kepentingan (*stakeholders*), tidak hanya pemegang saham (*stockholders*). *Good corporate Governance* dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat di perbaiki dengan segera.

Kasus di dalam negeri yang dilakukan PT. Waskita Karya memanipulasi laporan keuangan dari tahun 2004-2008 hingga mencapai jumlah 400 milyar. Kasus tersebut tentu menjadi pukulan berat bagi pemerintah Indonesia yang lagi gencar melaksanakan implementasi *good corporate governance* terhadap seluruh perusahaan di Indonesia. Fakta tersebut terungkap akibat dari keengganan perusahaan dalam melaksanakan *good corporate governance*. Pada kasus yang lain, BPK mendapati temuan pada PT. Jamsostek tahun 2011 dengan melakukan pelanggaran dalam laporan keuangan. Berdasarkan temuan tersebut negara dirugikan hingga Rp 7 triliun. Lemahnya dalam implementasi *good corporate governance* menjadi penyebab terjadinya pelanggaran dalam menyusun laporan keuangan.

Dampak dari kasus tersebut mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat atau *stakeholder* pada perusahaan atau institusi pendukungnya. Hal tersebut tentu merugikan perusahaan sendiri dalam mengembangkan perusahaan. Iskandar dan Chamlou dalam Hidayah (2008) menyatakan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan negara lainnya bukan hanya akibat dari faktor ekonomi makro, tetapi juga karena lemahnya *good corporate governance* yang ada pada negara tersebut, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi, dan pemeriksaan keuangan (auditing) yang belum mapan, pasar modal yang masih *non-regulated*, lemahnya pengawasan komisi, dan terabaikannya hak minoritas. Oleh karena itu, *corporate governance* menjadi salah satu bahasan penting dalam rangka mendukung

pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di masa yang akan datang.

Pengungkapan *corporate governance* yang transparan, tepat waktu, dan akurat merupakan nilai tambah bagi semua *stakeholder*. Jika tidak ada yang memadai, para *stakeholders* tidak dapat meyakini dari setiap kegiatan yang dijalankan oleh manajemen dijalankan dengan cara yang bijaksana dan baik untuk kepentingan mereka. Zakarsyi (2006) dalam Purtanto (2013:3).

Pemerintah Indonesia memberikan tanggapan yang baik terhadap perkembangan isu mengenai *good corporate governance*. Dibuktikan melalui BAPEPAM mengeluarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik menyatakan bahwa laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan *corporate governance* perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir.

Penelitian kali ini meneruskan penelitian terdahulu dari skripsi Rini (2010) dengan menguji luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan publik di Indonesia dengan masa pengamatan 2 tahun. Penelitian ini menguji luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur. Faktor yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah dua rasio keuangan (*profitabilitas* dan *leverage*) dan dua rasio non keuangan (ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris) terhadap luas pengungkapan

*corporate governance*. Peneliti akan menggunakan data yang lebih panjang yakni 5 periode dari tahun 2008-2012.

Perusahaan manufaktur memiliki karakter yang berbeda dengan perusahaan jasa maupun dagang. Karakter yang paling utama perusahaan manufaktur adalah pada kegiatan produksi. Pengelolaan perusahaan manufaktur sangat luas sehingga diperlukan banyak sumber daya alam dan manusia, serta banyak berhubungan dengan *stakeholder* membuat pengelolaan *corporate governance* yang baik sangat diperlukan untuk kelangsungan perusahaan. Sehingga penulis merasa perlu dilakukan penelitian terhadap luas pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan manufaktur. Selain itu, penelitian luas pengungkapan jarang dilakukan pada perusahaan manufaktur.

Perusahaan manufaktur dalam melakukan kegiatan produksi memerlukan dana yang besar. Salah satu sumber pendanaan adalah dari hutang. Kreditur akan lebih senang memberikan hutang kepada perusahaan yang besar. Hal tersebut dilakukan karena kreditur merasa aman dengan jumlah aset perusahaan yang besar. Resiko hutang tak tertagih pada perusahaan besar relatif kecil. Hutang yang diperoleh akan menjadi modal kegiatan produksi. Jumlah modal yang digunakan akan berpengaruh terhadap laba yang akan diterima. Semakin besar modal maka akan semakin besar laba yang diperoleh. Dengan besarnya modal yang digunakan, pasti akan banyak melibatkan/membutuhkan agen dalam melakukan pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan faktor-faktor ukuran perusahaan, *profitabilitas*, ukuran dewan komisaris, dan *leverage*.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Rini (2010). Hasil Penelitian menunjukkan adanya pengaruh besaran perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Hasil penelitian Kusumawati (2007) juga menunjukan hasil yang sama dengan penelitian Rini (2010). Semakin besar perusahaan maka manajemen mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang lebih dan handal. Pada umumnya semakin besar perusahaan maka akan lebih lengkap informasi yang akan di ungkapkan untuk tujuan manajerial, khususnya untuk pengungkapan internal pengawasan oleh manajemen puncak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Murtanto dan Elvina (2005) yang menunjukkan bahwa besaran perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan.

Nurkhin (2009) melakukan penelitian terhadap *profitabilitas* menunjukkan adanya pengaruh dengan luas pengungkapan sukarela. *Profitabilitas* sering sekali digunakan sebagai uji utama atas keefektivitasan operasi manajemen (Keiso et al, 2010:401). Perusahaan dengan *profitabilitas* yang tinggi akan berbeda luas pengungkapan *corporate governance* dengan perusahaan *profitabilitas* rendah. Menurut Muhamad et al. (2009) menyatakan bahwa perusahaan dengan *profitabilitas* yang tinggi lebih cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi. Informasi ini digunakan untuk mendukung kelangsungan posisi perusahaan tersebut.

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris perusahaan (Sembiring, 2005). Penelitian Putranto (2013) menunjukkan adanya pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan *corporate*

*governance*. Penelitian terhadap ukuran dewan komisaris juga dilakukan oleh Nurkhin (2009) dan menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan.

Penelitian terdahulu dari Almilia (2007) menunjukkan hasil penelitian, bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Muhamad et al. (2009) menyebutkan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi mempunyai kewajiban yang lebih tinggi untuk mengungkapkan informasi untuk menyakinkan kreditur dalam memperoleh pinjaman.

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai luas pengungkapan pada perusahaan manufaktur, dengan mengangkat judul: **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan *Corporate Governance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan Manufaktur di BEI?
2. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan Manufaktur yang di BEI?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan Manufaktur yang di BEI?

4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan Manufaktur di BEI?
5. Apakah ukuran perusahaan, *profitabilitas*, ukuran dewan komisaris dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap luas pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan Manufaktur di BEI?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian mengenai “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia” memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan Manufaktur di BEI.
2. Mengetahui pengaruh *profitabilitas* terhadap luas pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan Manufaktur di BEI.
3. Mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan Manufaktur di BEI.
4. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap luas pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan Manufaktur di BEI.
5. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, *profitabilitas*, ukuran dewan komisaris dan *leverage* terhadap luas pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan Manufaktur di BEI.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi stakeholder, sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan baik dalam hal investasi maupun dalam hal pengajuan kredit.
2. Bagi perusahaan, sebagai tambahan informasi mengenai pentingnya penerapan dan pengungkapan *corporate governance*.
3. Bagi peneliti berikutnya, sebagai acuan untuk mengembangkan pengungkapan *corporate governance* yang lebih luas.

### 1.4 Batasan Penelitian

Batasan masalah merupakan salah satu aspek yang penting dalam penulisan skripsi ini. Batasan masalah bertujuan menghindari adanya tumpang tindih pembahasan di luar sasaran yang akan dicapai. Melalui pembatasan masalah ini, penulis akan memberikan batasan pengertian tentang ruang lingkup sasaran yang akan dikaji. Batasan masalah yang diambil berdasarkan data perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008-2012.

Batasan masalah juga dicerminkan dari variabel yang digunakan oleh penulis dalam menentukan faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* yaitu ukuran perusahaan, *profitabilitas*, ukuran dewan komisaris, dan *leverage*.